



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 12 Maret 2017

Halaman: 2

TAK SEJALAN PENUMBUHAN EKONOMI KREATIF

Rencana Pelarangan Transportasi Online Ditentang

YOGYA (KR) - Rencana pelarangan transportasi online di wilayah DIY mendapat pertentangan kalangan DPRD Kota Yogya. Hal ini lantaran keberadaan transportasi online turut berperan dalam pengentasan pengangguran serta menjadi model pertumbuhan ekonomi kreatif.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, kebutuhan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau masih menjadi persoalan pelik. "Kehadiran transportasi online dikarenakan respons yang lambat dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat tentang transportasi umum maupun kebutuhan lapangan kerja," ungkapnya, Sabtu (11/3).

Oleh karena itu, pihaknya cukup kaget setelah mendapat informasi terkait rencana pelarangan transportasi online tersebut. Apalagi, kehadiran aplikasi online seperti Go-Jek, Uber maupun Grab, disambut baik oleh masyarakat luas.

Justu, imbuhan Rifki, pemerintah daerah seharusnya bertindak lebih bijak dengan mampu menjembatani pro kontra keberadaan transportasi online tersebut. Apalagi adanya aplikasi online benar-benar memberikan kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat.

"Harusnya ada upaya legalisasi dan bersanding dengan transportasi umum yang ada saat ini. Ribuan orang yang sebelumnya menganggur, kini berhasil memiliki pendapatan dari menjalankan transportasi online. Apalagi, masyarakat selaku konsumen sudah memberikan kepercayaan, urainya."

Rifki menjelaskan, pihaknya saat ini juga tengah membahas kemunculan regulasi terkait ekonomi kreatif. Salah satu bentuk ekonomi kreatif tersebut ialah pemanfaatan teknologi dalam menghadirkan fitur yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu sudah dibuktikan dengan keberadaan aplikasi online dengan berbagai layanan yang diberikan.

Dengan begitu, inovasi yang dikembangkan dari kemajuan teknologi itu sepatutnya mendapat payung hukum. Sebaliknya, jika muncul resistensi dari pemerintah, maka potensi ekonomi dari sisi pengembangan teknologi tidak akan mampu dikembangkan.

"Rencana kebijakan pelarangan transportasi online harus dikaji ulang. Jangan sampai justru setelahnya menimbulkan persoalan pelik. Tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sosial, tandasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005